



RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KUDUS**

Jl. Simpang Tujuh No.1 , Telepon (0291) 430080 Fax (0291) 445324 KUDUS



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Alloh SWT , karena berkat Rahmat dan hidayahnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Tahun 2024 Kabupaten Kudus telah selesai.

Renja Bappeda Kabupaten Kudus ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2023 dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 tahun 2023. Secara tatacara, penyusunan Renja Bappeda mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD,RPJMD dan RKPD. Secara substansi mempedomani RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024.

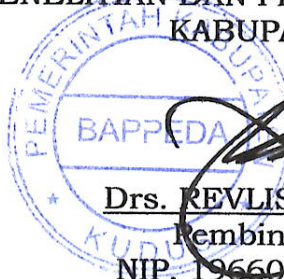
Dokumen Renja Bappeda memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target serta pagu indikatif. Rumusan program kegiatan dan subkegiatan sebagaimana telah tertuang dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 dengan tetap berpedoman pada Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Renja Bappeda Tahun 2024 menjadi acuan penyusunan RKA sebelum disahkan menjadi DPA Bappeda Kabupaten Kudus.

Dokumen Renja Bappeda Tahun 2024 ini masih belum sempurna sehingga saran, masukan dan kritik konstruktif terbuka bagi kami untuk kesempurnaannya, yang pada akhirnya dengan berpedoman pada dokumen ini, kita dapat optimal melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui perencanaan yang berkualitas.

Kudus, Agustus 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS



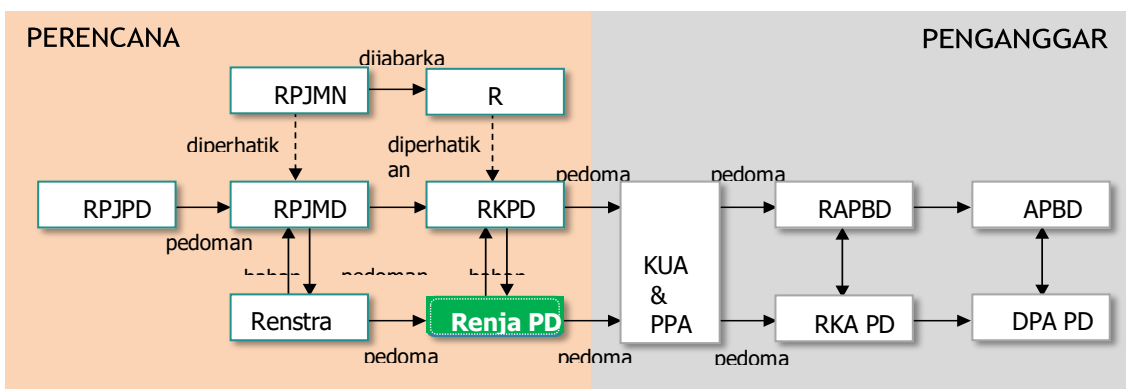
Drs. REVLISIANTO SUBEKTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660321 198603 1 006

BAB I P E N D A H U L U A N

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), renja PD yang bersifat tahunan harus selalu mempedomani Renstra PD yang merupakan dokumen 5 tahunan. Pedoman yang dimaksud meliputi rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, subkegiatan beserta target sesuai tahun berkenaan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat 2 mengamanatkan “Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Keterkaitan antar dokumen terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan dan Proses Penyusunan RAPBD

Dalam upaya melaksanakan amanat regulasi tersebut dan guna memiliki dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas, maka Renja Bappeda Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 yang

terjabarkan di RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024 dan Renja Bappeda Tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra Bappeda Tahun 2024-2026.

Seiring dengan perkembangan regulasi perencanaan utamanya regulasi turunan atas Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah maka sub kegiatan termuat di dalam Renja. Hal ini kemudian juga diikuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Simultan saat proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024, diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga Renja Bappeda Tahun 2024 telah berpedoman dengan regulasi dimaksud.

Renja Bappeda Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Tahun 2024.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
- r. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 10);
 - s. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 14);
 - t. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 20).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Bappeda pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada RKPD Tahun 2024;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Tahun 2024.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Bappeda Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan renja perangkat daerah, keterkaitan antara renja perangkat daerah dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan tindaklanjutnya dengan proses RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang UU, PP, Peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garisbesar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pokok-pokok materi yang disajikan antara lain :

- a. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- b. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- c. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target program/kegiatan/subkegiatan
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

- f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan subkegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi jumlah program, kegiatan dan subkegiatan, sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan subkegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber dana
- c. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama serta tanda tangan kepala perangkat daerah beserta cap/stempel perangkat daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Sebagai implementasi atas gambar/diagram keterkaitan antar dokumen perencanaan dan menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan serta mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan yang direncanakan, maka perlu disajikan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/permasalahan yang dihadapi.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

- a. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan tahun 2022, tidak ada Program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil maupun target kinerja keluaran.

- b. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan tahun 2022, semua Program/kegiatan/subkegiatan telah memenuhi target kinerja hasil maupun target kinerja keluaran.

- c. Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sampai dengan tahun 2022, Program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja hasil maupun target kinerja keluaran, adalah:

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/Kota dengan indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah, capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 105,73% dengan capaian renstra PD sebesar 109,52%
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator jumlah ASN yang kompetensinya meningkat, capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 140% dengan capaian renstra PD diatas 100%.

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target program/kegiatan/subkegiatan.

Sebagaimana data yang tersaji sebelumnya, bahwa tidak ada program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target sehingga tidak ada faktor penyebab yang dapat disampaikan. Namun, atas terpenuhinya capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh faktor kapasitas SDM yang memadai, ketercukupan anggaran, dan kepatuhan dan komitmen terhadap perencanaan yang telah disusun.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Diharapkan hasil dari pelaksanaan program kegiatan dan aktivitas yang telah dilakukan membawa implikasi positif pada pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda.

- f. Kebijakan yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan yang diambil untuk mempertahankan capaian kinerja adalah penguatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan aktivitas kinerja.

Tabel 2.1 (Format Tabel T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023 Kabupaten Kudus

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2023	
					Target Renja Th. 2022 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10	11 = (10/4)
5.01	URUSAN PERENCANAAN									
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	85	87,76	83,5	86	105,84 %	85	93,09	109,52 %
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	30 dok	15 dok	15 dok	15 dok	100%	15 dok	15 dok	100%

5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	1 dok	9 dok	9 dok	9 dok	100%	1 dok	9 dok	100%
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, dan pelaporan PD yang tersusun sesuai standart	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 dok	6 dok	100%
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	8 dok	100%
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pengelola kegiatan/keuangan PD	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	100%	7 orang	7 orang	100%
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	8 dok	100%
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya pedoman pengelolaan keuangan PD	8 dok	8 dok	8 dok	8 dok	100%	8 dok	8 dok	100%
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5 orang	5 orang	5 orang	7 orang	140%	35 orang	35 orang	700%
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	5 orang	3 orang	5 orang	5 orang	100%	5 orang	5 orang	100%

5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah ASN yang kompetensinya meningkat	35 orang	2 orang	35 orang	35 orang	100%	35 orang	35 orang	100%
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standart	57 dok	38 dok	38 dok	38 dok	100%	38 dok	38 dok	100%
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56 jenis	50 jenis	45 jenis	45 jenis	100%	50 paket	50 paket	100%
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	10 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100%	8 paket	8 paket	100%
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	100%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%	5 jenis	5 jenis	100%
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 judul	2 judul	2 judul	2 judul	100%	2 judul	2 judul	100%
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah koordinasi dan konsultasi	60 kali	30 kali	30 kali	30 kali	100%	80 laporan	80 laporan	100%

5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah PHD dan tenaga administrasi	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100%	8 orang	8 orang	100%
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah PHD dan tenaga	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100%	8 orang	8 orang	100%
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah sarpras aparatur kantor yang terpelihara	30 unit	5 unit	30 unit	30 unit	100%	31 unit	31 unit	100%
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pembayaran pajak/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	5 mobil; 26 motor; 69 unit	5 mobil; 26 motor; 10 unit	30 unit	30 unit	100%	31 kendaraan	31 kendaraan	100%
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kerja yang dipelihara	10 unit	17 unit	10 unit	10 unit	100%	17 unit	17 unit	100%
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%

	Lainnya									
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase keterisian data/informasi	65%	60%	60%	60%	100%	65%	65%	100%
5.01.02. 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	jumlah dokumen Renja OPD	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	5 dok	5 dok	100%
		jumlah dokumen SPPD	5 kegiatan	5 kegiatan	-	-	-	-	-	100%
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat Daerah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 berita acara	1 berita acara	100%

		Jumlah berita acara forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah	-	-	-	-	-	1 berita acara	1 berita acara	100%
		Jumlah pelaksanaan forum konsultasi publik	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	-	-	100%
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan musrenbang Kabupaten	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
		Jumlah berita acara musrenbang Kab?Kota	-	-	-	-	-	1 berita acara	1 berita acara	100%
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen bahan musrenbang kecamatan	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
		Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh kecamatan	-	-	-	-	-	482 usulan	482 usulan	100%
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah tingkat Kabupaten	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	-	-	100%
		jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	-	-	-	-	-	3 dok	3 dok	100%
5.01.02. 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%

	Perencanaan Pembangunan Daerah									
5.01.02. 2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi pembangunan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	-	-	100%
		Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	-	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
5.01.02. 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
5.01.02. 2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	-	-	100%
		Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan	-	-	-	-	-	1 buku	1 buku	100%
		Jumlah laporan perencanaan pembangunan menurut sumber dana (DAK dan Bangub)	-	-	-	-	-	2 dok	2 dok	100%

5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan Sosial Budaya	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%
		Indeks kualitas perencanaan bidang pemsosbud	-	-	-	-	-	100	100	100%
		cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Indeks kualitas perencanaan bidang praswil, ekonomi, SDA	-	-	-	-	-	100	100	100%
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya	10 dok	2 dok	3 dok	3 dok	100%	-	-	100%
		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-	-	-	-	-	5 dok	5 dok	100%

5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan pemerintahan	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosbud	5 dok	1 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	-	-	-	-	-	4 dok	4 dok	100%
5.01.03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi dan SDA	15 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
5.01.03 2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	5 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%			100%

	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	-	-	-	-	-	2 dok	2 dok	100%
5.01.03 2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dan LH (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan SDA & LH	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	-	-	100%
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	-	-	-	-	-	2 dok	2 dok	100%
5.01.03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	1 dok	1 dok	100%

5.01.03 2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	jumlah dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah	10 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	-	-	100%
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	100%
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	100%	86%	86%	86%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Peningkatan hasil kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%
		Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	5 dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	-	-	100%

		Jumlah rekomendasi, studi kelayakan, naskah akademik, dan inovasi teknologi bidang ekbang yang digunakan untuk perumusan kebijakan	-	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	jumlah dokumen penelitian dan pengkajian	5 dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	-	-	100%
		Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	
5.05.02.2.04	Pengembangan dan inovasi	jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	5 dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	jumlah dokumen pengembangan dan inovasi	5 dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
		Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan inovasi	-	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Bappeda adalah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu maka tugas pokoknya adalah perumusan kebijakan pembangunan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan hasil perencanaan pembangunan. Dalam menganalisa kinerja pelayanan Bappeda didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda 2024-2026. Adapun analisis kinerja Bappeda ditampilkan pada tabel 2.2 (Format TC-30).

Tabel 2.2. (Format TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kudus

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	IKK (PMDN 18/2020)	TARGET RENSTRA				REALISASI		PROYEKSI		Catatan Analisis
			2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	2022 (n-2)	2023 (n-1)	2024 (n)	2025 (n+1)	
Tujuan : Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	82	83	-	-	82	83	Capaian kinerja secara umum dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, serta perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala untuk memastikan capaian kinerja di akhir periode Renstra dapat tercapai sesuai target
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas Perencanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Persentase Capaian IKU Bupati		100%	100%	100%	100%	91.91%	-	100%	100%	
	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Daerah	-	100	100	100	-	-	100	100	
Sasaran 2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	81	83	85	86	83	-	85	86	
Sasaran 3: Terwujudnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan daerah		86%	100%	-	-	86%	-	-	-	
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah	-	-	20	20	-	-	20	20	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Secara umum kinerja pelayanan Bappeda terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2022 maupun sampai akhir capaian Renstra Tahun 2018-2023 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai, bahkan terlampaui.
- b. Beberapa indikator kinerja daerah bersifat makro yang belum dapat mencapai target, diantaranya;
- c. Hasil Evaluasi SAKIP yang merupakan evaluasi menghitung tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Karena salah satu komponen penilaian evaluasi SAKIP adalah pada sisi perencanaan, maka Bappeda perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan capaian tersebut, dimana hal ini berkaitan dengan peran Bappeda sebagai koordinator perencanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan diantaranya:

1. Perlu dimaksimalkannya ketersediaan serta updating data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini peran Bappeda selaku Sekretaris dalam Forum Satu Data terkendala masih belum adanya petunjuk yang jelas dari Koordinator Pusat (Bappenas). Selain itu juga terdapat permasalahan yang terjadi saat proses pengumpulan data dari perangkat daerah, baik dalam hal kelengkapan maupun validitas data.
2. Terdapat perubahan regulasi dari pusat yang menyebabkan perlunya penyesuaian pada dokumen perencanaan, diantaranya adalah :
Diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja sub kegiatan maupun terhadap beberapa nomenklatur sub kegiatan termasuk pemutkhiran pada SIPD nya. Hal ini berpengaruh dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

3. Penajaman fokus evaluasi SAKIP Tahun 2023 yang semula 3 fokus di tahun 22 menjadi 4 fokus yaitu kesatu, efektifitas penggunaan APBN/APBD yang dilakukan instansi pemerintah, kedua, penjenjangan kinerja untuk memastikan setiap unit kerja dan individu memiliki kinerja dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi, ketiga memastikan program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi dan keempat pelaksanaan evaluasi internal. Hal ini harus direspon Bappeda sebagai perangkat daerah yang mengkoordinasikan perencanaan di tingkat Kabupaten dan perencanaan tingkat Bappeda, karena berkaitan dengan tolak ukur kinerja / indicator kinerja Pembangunan yang diperjanjikan.
4. Hasil Forum Konsultasi Pelayanan Publik atas layanan Bappeda Tahun 2023, mengamanatkan agar dioptimalkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi atas kinerja koordinatif Bappeda.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, ke depan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda, khususnya di tahun 2024 mendatang, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Dinamika regulasi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah.
Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah yang cukup dinamis menuntut sumber

daya aparatur pada Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan menerapkan perkembangan regulasi tersebut.

- 2) Tingkat pemahaman masyarakat termasuk DPRD Kabupaten Kudus terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam, mengharuskan Bappeda bekerja lebih sistematis dan sinergis agar dokumen perencanaan yang dihasilkan tepat waktu, berkualitas, dan tepat sasaran

b. Peluang

- 1) Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

- 2) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.

- 3) Tersedianya potensi sumber daya aparatur.

Potensi sumber daya aparatur yang tersedia perlu dikelola secara tepat termasuk peningkatan kapasitasnya baik kapasitas teknis maupun kapasitas sosio kultural sehingga pelaksanaan tugas koordinasi dapat optimal.

- 4) Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya, dalam proses perencanaan pembangunan

daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Bappeda, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut :

a. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator dan targetnya, telah dijabarkan dalam dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten dan tingkat perangkat daerah. Tujuan dan sasaran daerah dijabarkan ke dalam program prioritas. Bappeda mendukung tujuan ke 4 yaitu terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan sasaran ke 6 yaitu meningkatnya akuntabilitas dan integritas pemerintahan.

Dalam hal ini, sebagai koordinator perencanaan pembangunan, salah satu fungsi Bappeda adalah pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, Bappeda perlu memiliki komitmen kuat dalam mengoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui pelaksanaan program prioritas, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan daerah.

b. Untuk tahun 2024, secara umum Bappeda menjalankan fungsi koordinatif terkait beberapa program yang dilakukan secara *crosscutting*, dengan keluaran sebagai berikut:

- Penanggulangan kemiskinan
- Penurunan angka stunting
- Perwujudan kota layak anak
- Perwujudan kota sehat
- Penanggulangan aids, tuberculosis dan malaria
- Pengkoordinasian data dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan data (SDG'S)
- Pengendalian inflasi

- Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan SDM ekonomi
- Pengelolaan persampahan
- Pemenuhan akses air minum layak dan aman
- Penyediaan akses sanitasi layak dan aman
- Rehabilitasi/Pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH)
- Penanganan kawasan kumuh
- Koordinasi sinkronisasi kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman
- Perencanaan pembangunan rendah karbon daerah

Optimalisasi fungsi koordinasi terus diupayakan untuk mendukung program Pemerintah dan mendukung pencapaian tujuan sasaran Pembangunan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hasil perbandingan ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan rumusan indikator, namun terdapat perbedaan pada target indikator dan pagu indikatif beberapa kegiatan dan sub kegiatan seperti yang telah ditampilkan pada tabel 2.3 (Format TC-31). Perbedaan tersebut terjadi karena :

- Review inspektorat atas rancangan RKPD, terdapat 28 target indikator yang berubah dan 60 program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami penyesuaian pagu indikatif.
- Perbedaan pagu indikatif juga terjadi karena penyesuaian harga sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati tentang SHS/SSH.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Secara tugas pokok dan fungsi, pelayanan Bappeda tidak berkaitan langsung masyarakat. Sehingga program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan dilaksanakan merupakan pelayanan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Tabel 2.3. (Format Tabel T-C.31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (Renstra PD 24-26)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
5.01	URUSAN PERENCANAAN				27.003.436.010	URUSAN PERENCANAAN					
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)	48 Nilai	7.800.395.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)	48 Nilai	8.490.451.860	
5.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah	100%	14.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah	100 persen	57.740.000	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	7.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	40.630.000	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	7.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	17.110.000	
5.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	90%	5.711.395.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	85 Persen	6.122.159.200	-

5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/bulan	5.625.395.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	6.067.154.000	
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 Dokumen	80.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	50.335.000	-
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	6.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4.670.200	
5.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	70%	760.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	70 Persen	573.900.000	-
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	25.500.000	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50 orang	700.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	83 Orang	548.400.000	-
5.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100%	637.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	100 persen	487.649.660	

5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7.500.000	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 paket	240.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	39.815.800	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.252.000	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	59.486.000	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25.059.860	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	9.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8.400.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	280.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	334.136.000	

5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan	100%	556.830.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan BMD sesuai ketentuan		507.712.000	
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	400.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	310.732.000	
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 unit	11.685.000	Pengadaan Mebel	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Unit	9.280.000	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	145.145.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	187.700.000	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100%	363.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 persen	382.567.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 laporan	93.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	103.758.000	

5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	270.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	278.809.000	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100%	270.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100 Persen	358.724.000	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	270.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	329.854.000	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	13.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	13.470.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	7.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	31 Unit	15.400.000	

5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Tingkat capaian hasil evaluasi Perencanaan pembangunan daerah	100%	165.000.000	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Tingkat capaian hasil evaluasi Perencanaan pembangunan daerah	100%	3.674.734.500	
			Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah	100%	2.450.696.000			Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah	100%		
5.01.02.2.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase dokumen perencanaan Daerah yang tersusun sesuai standart	100%	1.960.696.000	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Persentase dokumen perencanaan Daerah yang tersusun sesuai standart	100 Persen	2.719.634.500	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	4 dokumen	270.000.000	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen	142.004.000	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	120.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita acara	177.462.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	509.696.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita acara	600.000.000	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	500 usulan	11.000.000	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	500 Usulan	11.000.000	

5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 dokumen	1.050.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	1.789.168.500	
5.01.02.2.02	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan		Jumlah dokumen satu data perencanaan yang sesuai standar	2 dokumen , 66%	490.000.000	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan		Jumlah dokumen satu data perencanaan yang sesuai standar	2 Dokumen, 66 Persen	630.360.000,00	
			Persentase keterisian data RKPD terhadap Data RPJMD					Persentase keterisian data RKPD terhadap Data RPJMD			
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	4 buku	490.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	630.360.000,00	
5.01.02.2.03	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah	100%	165.000.000	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah	100 Persen	324.740.000,00	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 laporan	165.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	324.740.000,00	

5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemsosbud	100%	460.000.000	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemsosbud	100 Persen	1.006.400.000,00	
			Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Praswileksda					Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Praswileksda			
5.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	460.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen	576.400.000,00	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	120.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13 Dokumen	140.000.000,00	

5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen %	340.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	27 Dokumen	436.400.000,00	
5.01.03.2.02	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Perekonomian dan SDA	100%	230.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen	295.000.000,00	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	110.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28 Dokumen	105.000.000,00	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	120.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25 Dokumen	190.000.000,00	

5.01.03.2.03	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah pengampu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	140.000.000	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah pengampu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persen	135.000.000,00	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 dokumen	140.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12 Dokumen	135.000.000,00	
5.05	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasikan	20%	530.000.000	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasikan	20 Persen	966.192.200,00	
5.05.02.2.01	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase tema/masalah idang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang telah tersusun penelitian dan pengembangannya sesuai standar	10%	100.000.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase tema/masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	20 Persen	83.882.000,00	

5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 laporan	100.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 Laporan	83.822.000,00	
5.05.02.2.02	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase tema/masalah Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah dipublikasikan	10%	100.000.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase tema/masalah Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah dipublikasikan	20 Persen	214.606.000,00	
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	11 Dokumen	214.606.000,00	
5.05.02.2.03	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase tema/masalah Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah dipublikasikan (kajian/riset/grand design)	20%	100.000.000	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase tema/masalah Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah dipublikasikan (kajian/riset/grand design)	20 Persen	100.000.000,00	
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	100.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4 Dokumen	100.000.000,00	
5.05.02.2.04	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase produk inovasi yang didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan HAKI	15%	230.000.000	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase produk inovasi yang didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan HAKI	20%	567.764.200,00	

5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 dokumen	230.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab Kudus, semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	567.764.200,00	
-----------------	--	--	---	-----------	-------------	--	--	---	-----------	----------------	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan regional dalam hal ini tingkat Kabupaten, harus selaras dengan perencanaan tingkat atasnya yaitu pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dan tingkat pusat. Demikian juga antara dokumen perangkat daerah dengan dokumen di atasnya dalam hal ini RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024, RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKP Tahun 2024. Untuk memberi keyakinan atas keselarasan itu, maka dilakukan penelaahan kebijakan nasional. Tema RKP Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan target sasaran pembangunannya meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen,
2. Tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen,
3. Tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7.
4. Rasio Gini 0,374-0,377,
5. Indeks pembangunan manusia 73,99-74,02,
6. Penurunan emisi gas rumah kaca 27,27,
7. Nilai Tukar Petani 107-110, dan
8. Nilai Tukar Nelayan 105-108.

Arah kebijakan RKP Tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024. Sedangkan telaah atas RPJPN Tahun 2020-2024, prioritas nasional dengan major project sebagai berikut :

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi

MP 2 Destinasi Wisata Prioritas

MP 3 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter

MP 4 Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan

Nelayan

MP 5 Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi

MP 6 Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng

MP 7 Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Pembangunan Wilayah Batam – Bintan

MP 2 Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar

MP 3 Ibu Kota Negara (IKN)

MP 4 Pengembangan Kota Baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong

MP 5 Wilayah Adat Papua : Laa Pago dan Domberay

MP 6 Pusat Kegiatan Strategis Nasional: PKSN Paloh-Aruk, PKSN Nunukan, PKSN Atambua, PKSN Kefamenanu, PKSN Jayapura, & PKSN Merauke

PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting

MP 2 Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh

PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

MP 1 Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas)

MP 2 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

PN 5 Memperkuat infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar, dengan *major project* sebagai berikut :

MP 1 Jalan Tol Trans Sumatera Aceh – Lampung

MP 2 KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)

- MP 3 Kereta Api Makassar-Pare Pare
- MP 4 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
- MP 5 Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan:
Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar
- MP 6 Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak
- MP 7 Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
- MP 8 Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
- MP 9 18 Waduk Multiguna
- MP 10 Jembatan Udara 37 Rute di Papua
- MP 11 Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan Jalan Trans Papua Merauke – Sorong
- MP 12 Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
- MP 13 Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
- MP 14 Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
- MP 15 Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
- MP 16 Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan (2.219 km)

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim, dengan *major project* sebagai berikut :

- MP 1 Pemulihan Pasca Bencana: (Kota Palu dan Sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta Kawasan Pesisir Selat Sunda)
- MP 2 Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa
- MP 3 Pemulihan Empat Daerah Aliran Sungai Kritis
- MP 4 Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
- MP 5 Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

PN 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan transformasi Pelayanan Publik

- MP 1 Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
- MP 2 Penguatan Keamanan Laut di Natuna

Sedangkan arah kebijakan prioritas pembangunann dalam RKP Tahun

2024 adalah:

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan Pendidikan
- 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- 4) Penguatan daya saing
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas
- 7) Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
- 8) Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024

Atas telaahan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2024, peran Bappeda adalah menyusun dokumen perencanaan dan mengkoordinasikan perangkat daerah dalam perencanaannya agar selalu selaras dengan kebijakan tingkat nasional.

Selanjutnya di tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026, dimana tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD. Guna memberi keyakinan atas keselarasannya dengan dokumen tingkat Kabupaten dalam hal ini di tingkat perangkat daerah maka disajikan rumusan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 meliputi:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,43

2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 - 4,94
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06-8,96
4. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 - 5,50

Pada tingkat Kabupaten, tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, yang memiliki tujuan yang harus didukung pencapaiannya oleh Perangkat daerah tak terkecuali Bappeda. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3. Transformasi ekonomi yang berdaya saing
4. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik
5. Pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat

Terkait prioritas Pembangunan di Kabupaten Kudus pada Tahun 2024 yang bertemakan peningkatan daya saing SDM dan keberdayaan masyarakat yang ditopang oleh wilayah yang semakin kondusif, prioritas pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2024 yaitu:

Prioritas Daerah 1 : Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia

Prioritas Daerah 2 : Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengangguran

Prioritas Daerah 3 : Percepatan transformasi ekonomi yang merata dan inklusif didukung infrastruktur berkualitas

Prioritas Daerah 4 : Perwujudan tata Kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel

Prioritas Daerah 5 : Penciptaan kondisi wilayah yang kondusif di tahun politik dengan tetap berwawasan lingkungan dan tahan bencana.

Bappeda mendukung prioritas ke-4 yaitu perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel utamanya pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan mengkoordinasikan sinergitas dan *sharing outcome* antar perangkat dalam pencapaian tujuan Pembangunan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Renja Bappeda Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Bappeda Tahun 2024-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan

sasaran pada Renja Bappeda Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Bappeda Tahun 2024-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Bappeda Tahun 2024, adalah : “Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik” dimana indikator kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut yaitu “Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”.

Penentuan target tujuan sesuai dengan target IKU daerah karena secara substansi Bappeda mendukung secara langsung tatakelola pemerintahan yang baik dengan indikator reformasi birokrasi. Dalam pencapaian tujuan Renja tersebut kemudian dijabarkan dalam sasaran – sasaran Renja beserta indikatornya, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah Dengan indikator sasaran yaitu “Indeks Perencanaan Pembangunan”.
2. Terwujudnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan dengan indikator sasaran yaitu “Indeks Inovasi Daerah”.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran yaitu “Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah”.

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Bappeda Tahun 2024, mengacu pada target yang tertuang dalam Renstra Bappeda periode Tahun 2024-2026 sebagaimana tersaji pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Target Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	-	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70
	Meningkatnya kualitas Perencanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	100
	Terwujudnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	Nilai	85

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan dan subkegiatan

Sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dengan aktivitas intinya adalah mengkoordinasikan perangkat daerah agar mampu menjalin kerjasama dan sinergi dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah, renja Bappeda mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Mempedomani RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2024, dimana RKPD Tahun 2024 mengacu pada RPJMN, RPD Tahun 2024-2026 Provinsi Jawa Tengah, RPD Tahun 2024-2026 Kabupaten Kudus serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 periode keempat.
2. Mengkoordinasikan Perangkat daerah dalam berkinerja mencapai Visi dan misi Kepala Daerah, namun karena Tahun 2024 merupakan penjabaran RPD Tahun 2024-2026 dimana merupakan tahun transisi menuju pemilihan umum serentak, maka belum ada visi misi Kepala Daerah yang ada adalah tujuan dan sasaran Pembangunan. Sehingga faktor yang dipertimbangkan adalah koordinasi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan daerah.
3. Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDG's)
4. Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai penurunan angka kemiskinan /penanggulangan kemiskinan
5. Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai tujuan dan sasaran organisasinya termasuk amanah pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
6. Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam berkinerja mencapai tujuan sasaran Pembangunan dari pendanaan yang bersumber dari selain APBD seperti APBN berupa DAK, APBD Provinsi berupa Bantuan Keuangan pada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
7. Mempertimbangkan pelaksanaan tugas dan fungsi internal Bappeda yang dicerminkan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

8. Mengkoordinasikan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan Pembangunan daerah.
 9. Mengkoordinasikan penggunaan sumber pendanaan yang diperhunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.
 10. Mengkoordinasikan perangkat daerah dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan inovasi.
 11. Tugas dan fungsi Bappeda dalam penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penelitian, pengkajian. pengembangan dan inovasi
- 4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi jumlah program, kegiatan dan subkegiatan, sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan subkegiatan dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber dana.

Secara garis besar rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Bappeda pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 program, yang terdiri dari 1 program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan 3 program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda pada tahun 2024 adalah sebanyak 17 kegiatan, yang terdiri dari 7 kegiatan penunjang, dan 10 kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
3. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda pada tahun 2024 adalah sebanyak 38 sub kegiatan, yang terdiri dari 22 sub kegiatan penunjang, dan 16 sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda;
4. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada Renja Bappeda Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 14.137.778.560,- yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kudus.

4.3. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Bappeda Tahun 2024 disertai indikator kinerja serta sumber pendanaan tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Bappeda Kab. Kudus Tahun 2024

NO	KODE	TUJUAN/SASARAN/ URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					14.137.778.560						12.266.493.000			
		Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73	69,21	69	70						71,9			
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi Sistim Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah	87	83	84	85						86			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						14.137.778.560						12.266.493.000		
	5.01	PERENCANAAN						13.171.586.360						11.706.893.000		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda)</i>	50 Nilai		47 Nilai	48 Nilai	8.490.451.860					49 Nilai	8.459.327.000		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah</i>	100 persen			100 persen	57.740.000			-	-	Perangkat Daerah	100 persen	16.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	9 Dokumen			18 Dokumen	40.630.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	9 Dokumen	8.000.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6 Laporan			10 Laporan	17.110.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	6 Laporan	8.000.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA</i>	90 persen			85 persen	6.122.159.200			-	-	Perangkat Daerah	90 persen	6.044.127.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	36 Orang/bulan			36 Orang/bulan	6.067.154.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	36 Orang/bulan	5.954.927.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	7 Dokumen			12 Dokumen	50.335.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	7 Dokumen	83.000.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	8 Dokumen			1 Dokumen	4.670.200	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	8 Dokumen	6.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun</i>	70 Persen			70 Persen	573.900.000			-	-	Perangkat Daerah	70 Persen	795.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	6 Orang			3 Orang	25.500.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	6 Orang	75.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	50 Orang			83 Orang	548.400.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	50 Orang	720.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar</i>	100 persen			100 persen	487.649.660			-	-	Perangkat Daerah	100 persen	687.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	7 Paket			7 Paket	7.500.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	7 Paket	9.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	40 Paket			6 Paket	39.815.800	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	40 Paket	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	8 Paket			1 Paket	13.252.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	8 Paket	20.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	10 Paket			10 Paket	59.486.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	10 Paket	65.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	5 Paket			5 Paket	25.059.860	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	5 Paket	0	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	2 Dokumen			2 Dokumen	8.400.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.100.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	30 Laporan			30 Laporan	334.136.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	30 Laporan	332.700.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen			-	507.712.000			-	-	Perangkat Daerah	100 persen	165.000.000	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	310.732.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	0 Unit	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	10 Unit			11 Unit	9.280.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	15 Unit	15.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	8 Unit			29 Unit	187.700.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	8 Unit	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu</i>	100 persen			100 persen	382.567.000			-	-	Perangkat Daerah	100 persen	412.400.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan			12 Laporan	103.758.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	3 Laporan	112.400.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	8 Laporan			12 Laporan	278.809.00 0	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	8 Laporan	300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD dalam kondisi baik</i>	100 persen			100 persen	358.724.00 0			-	-	Perangkat Daerah	100 persen	339.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	30 Unit			30 Unit	329.854.00 0	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	30 Unit	300.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit			19 Unit	13.470.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	10 Unit	14.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	5 Unit			31 Unit	15.400.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	5 Unit	25.000.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	100			100							100		
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Tingkat capaian hasil evaluasi Perencanaan pembangunan daerah Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan Daerah</i>	100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	3.674.734.500						100 persen 100 persen	2.367.566.000	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Persentase dokumen perencanaan Daerah yang tersusun sesuai standart</i>	100 persen			100 persen	2.719.634.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus	100 persen	1.697.566.000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
			<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah</i>	4 Dokumen			2 Dokumen	142.004.00 0	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintah an yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus	4 Dokumen	265.566.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>	1 Berita Acara			2 Berita Acara	177.462.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perwujudan tata kelola pemerintah an yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus	1 Berita Acara	120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i>	1 Berita Acara			1 Berita Acara	600.000.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintah an yang dinamis dan akuntabel	Masy Kabupaten Kudus	1 Berita Acara	200.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			<i>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</i>	500 Usulan			500 Usulan	11.000.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus	500 Usulan	12.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	2 Dokumen			5 Dokumen	1.789.168.500	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Masyarakat Kabupaten Kudus	2 Dokumen	1.100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah dokumen satu data perencanaan yang sesuai standar Persentase keterisian data RKPD terhadap Data RPJMD</i>	2 Dokumen 68persen			2 Dokumen 66 persen	630.360.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	67 persen 2 Dokumen	500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</i>	1 Buku			4 Buku	630.360.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku a t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	4.Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintah an yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	1 Buku	500.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Tingkat capaian hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah</i>	100 persen			100 persen	324.740.000			-	4.Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintah an yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	100 persen	170.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.000 1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	3 Laporan			4 Laporan	324.740.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 4. Perwujudan tata kelola pemerintah an yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	3 Laporan	170.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	<i>Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemosbud Konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah bidang Praswileksda</i>	100 persen 100 persen			100 persen 100 persen	1.006.400.000					100 persen 100 persen	880.000.000		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	100 persen			100 persen	576.400.000			-	4.Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintah an yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	100 persen	480.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	1 Dokumen			13 Dokumen	140.000.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintah an yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	1 Dokume n	130.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
5.01.03.2.01.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)</i>	1 Dokumen			27 Dokumen	436.400.000,00	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	1 Dokumen	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Tingkat Konsistensi antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Bidang Perekonomian dan SDA</i>	100 persen			100 persen	295.000.000			-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	100 persen	250.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)</i>	1 Dokumen			28 Dokumen	105.000.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	1 Dokumen	120.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>	2 Dokumen			25 Dokumen	190.000.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	2 Dokumen	130.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<i>Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan Perangkat Daerah pengampu Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	100 persen			100 persen	135.000.000			-	4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	100 persen	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)</i>	2 Dokumen			12 Dokumen	135.000.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	2 Dokumen	150.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						966.192.200						559.600.000		
		Terwujudnya perumusan kebijakan berbasis kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah				53 indeks									
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian pengembangan diseminarkan/dipublikasikan	20 persen			20 persen	966.192.200					20 persen	559.600.000		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase tema/masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	20 persen			20 persen	83.822.000			-	4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	20 persen	105.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan			3 Laporan	83.822.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	1 Laporan	105.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Persentase tema/masalah Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah dipublikasikan</i>	20 persen			20 persen	214.606.000			-	4.Perwujudan tata kelola pemerintahan an yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	20 persen	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</i>	1 Dokumen			11 Dokumen	214.606.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4.Perwujudan tata kelola pemerintahan an yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	1 Dokumen	100.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	<i>Persentase tema/masalah Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah dipublikasikan (kajian/riset/grand design)</i>	20 persen			20 persen	100.000.000			-	4. Perwujudan tata kelola pemerintahan an yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	20 persen	105.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>	1 Dokumen			4 Dokumen	100.000.000	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.Perwujudan tata kelola pemerintahan an yang dinamis dan akuntabel	Pemerintah Kabupaten Kudus	1 Dokumen	105.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	<i>Persentase produk inovasi yang didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan HAKI</i>	20 %			20 %	567.764.200			-	4.Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintah an yang dinamis dan akuntabel	Masy. Kab. Kudus	20 %	249.600.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	2 Dokumen			24 Dokumen	567.764.200	Kab. Kudus, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 4.Perwujudan tata kelola pemerintah an yang dinamis dan akuntabel	Masy. Kab. Kudus	2 Dokumen	249.600.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
								14.137.778.560							12.266.493.000		

BAB V

P E N U T U P

Renja Bappeda Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Renja Bappeda pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran Pembangunan Kabupaten Kudus;
2. Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Bappeda Tahun 2024-2026. Namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam penyusunan Renja Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sub kegiatan. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya review terhadap Renstra.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Bappeda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Bappeda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kudus. Begitu pula dalam penyusunan

DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kudus serta hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Tindaklanjut penyusunan dokumen Renja Tahun 2024 ini adalah ;

1. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan renja setiap triwulannya;
2. Jika hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan renja menunjuk perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja, maka dokumen renja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
3. Dalam hal terjadi perubahan regulasi dan atau kebijakan Pemerintah Pusat terkait hal-hal yang mengharuskan adanya penyesuaian perencanaan Pembangunan, maka dokumen renja ini juga dapat disesuaikan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
4. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024.

Program, kegiatan, subkegiatan pada Renja Tahun 2024 akan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, bekerjasama harmonis, berkoordinasi efektif antar dan intra organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dan Bappeda.

Dengan disusunnya Renja Tahun 2024 ini diharapkan terwujud keterkaitan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta kolaborasi dalam pelaksanaan Pembangunan.

Kudus, Agustus 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS



[Handwritten Signature]
Drs. REVLISIANTO SUBEKTI
Pembina Utama Muda
NIP. 19660321 198603 1 006